IMPLEMENTASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KANTOR KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG

Nurakna Julianti
Email: juliantinuraknajulianti@gmail.com
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan
Kode Pos 91112

Abstrak

Kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja keuangan instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Camat Maiwa, Sekretaris Kecamatan Maiwa, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Maiwa telah menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan cukup baik. Pada tahap perencanaan anggaran, indikator kinerja disusun dengan memperhatikan program prioritas dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap pengesahan, dokumen anggaran telah disusun secara akuntabel dan transparan sesuai regulasi yang berlaku. Implementasi anggaran dilaksanakan sesuai rencana kerja dan indikator capaian, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi dilakukan secara periodik melalui laporan realisasi anggaran serta evaluasi kinerja kegiatan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan SDM dalam memahami teknis pengukuran kinerja dan kebutuhan peningkatan pelatihan teknis bagi staf perencanaan. Secara umum, proses implementasi menunjukkan konsistensi terhadap prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Kata Kunci: **Anggaran Berbasis Kinerja, Pemerintahan Daerah, Evaluasi Kinerja, Efisiensi Anggaran**

Abstract

This study aims to determine the implementation of performance-based budgeting in the administration of government affairs at the Maiwa Sub-District Office, Enrekang Regency. The informants in this study consisted of the Head of Maiwa Sub-District, the Secretary of Maiwa Sub-District, and the Head of the Planning and Finance Sub-Division.The data collection methods employed include observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used was qualitative analysis, which included stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that the Maiwa Sub-District Office has implemented performance-based budgeting quite effectively. In the budgeting phase, performance indicators were established by considering priority programs and community needs. During the approval phase, the budget documents were prepared in a transparent and accountable manner according to the applicable regulations. The budget implementation was carried out according to the work plan and achievement indicators, while the reporting and evaluation phase was done periodically through budget realization reports and performance evaluations of activities. However, there were some technical challenges, such as limited human resources in understanding performance measurement techniques and the need for further technical training for planning staff. Overall, the implementation process demonstrated consistency with the principles of efficiency, effectiveness, and accountability in performance-based budget management.

Keywords**: **Performance-Based Budgeting, Local Government, Performance Evaluation, Budget Efficiency

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan tekanan pada peningkatan pengawasan terhadap jalannya otonomi daerah. Undang-undang tersebut merupakankebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan desentralisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di indonesia. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan lebih mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan percepatan pembangunan dalam usaha pencapaian tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur.

Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik merupakan hal yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penyusunan anggaran merupakan suatu proses politik. Semua informasi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran harus diketahui oleh publik untuk mendapatkan kritik atau masukan. Pengertian anggaran sektor publik menurut Indra Bastian (2013:69) anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Penyusunan anggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, maka organisasi sektor publik harus menerapkan asas transparansi.

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ABK (anggaran berbasis kinerja). Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Sejak saat itu penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mulai secara efektif dilaksanakan. Untuk memenuhi pelaksanaan otonomi di bidang keuangan dengan terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang baru, diperlukan sumber daya yang mampu untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja. Mengingat pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian terkait pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai salah satu bentuk reformasi keuangan di indonesia, maka penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi sangat menarik untuk diteliti dan tentunya dikaji lebih mendalam, selain sistem penganggaran yang relatif baru, sehingga tujuan penganggaran publik dapat diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, manfaat, partisipatif, transparan, akuntabel, dan menghargai kearifan lokal. Beberapa daerah atau institusi telah mengimplementasikan sistem ini, namun perlunya melihat implementasi anggaran berbasis kinerja secara lebih mendalam pada suatu daerah, agar bisa dilihat sejauh mana efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja.

Maka rencana penelitian ini diarahkan untuk menemukan dan menjelaskan hasil dari implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja. Mengingat kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja keuangan instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik, apalagi yang tak kalah pentingnya bahwa terdapat anggaran belanja yang dilimpahkan pada tiap daerah, khususnya Pemerintah Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang untuk mengelola dana disertai dengan program strategis yang dijalankan, sehingga diperlukan sistem yang tidak hanya melihat capaian dari suatu program, tetapi yang diharapkan adalah terciptanya Output dan Outcome, sehingga dianggap perlu untuk melihat implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang terletak di Jl. Ratulangi No. 43 (Jalan Poros Rappang-Enrekang). Informan dari Penelitian yang dilakukan di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Camat Maiwa
2. Sekretaris Kecamatan Maiwa
3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

   Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan mencatat peristiwa yang diselidiki. Hasil dari kegiatan observasi ini dicatat dalam bentuk kata-kata inti yang seharusnya dikembangkan dalam bentuk laporan.
2. Wawancara

   Menurut Tersiana (2018: 12), wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data penellitian dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan subjek yang berkontribusi langsung dengan objek yang diteliti. Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.
3. Dokumentasi

   Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dokumen yang meliputi DPA OPD, Renstra OPD, RKA OPD, Laporan Kinerja serta dokumen penunjang lainnya. Data dokumen digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Teknik analisis data

a. Pengumpulan Data
b. Reduksi Data
c. Penyajian Data
d. Kesimpulan atau Verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan atas hasil capaian keuangan realisasi kegiatan di tahun 2020, dapat di analisis bahwa Kantor Kecamatan Maiwa telah menggunakan anggaran sebesar 100% atau dari total anggaran kegiatan Rp 1.259.911.000,- terealisasi sejumlah Rp 1.259.911.000,-. Dari 6 (enam) program dan 31 kegiatan diketahui bahwa :

1. Jumlah kegiatan terserap anggaran 100% : 31 kegiatan
2. Jumlah kegiatan terserap anggaran 80-99,9% : - kegiatan
3. Jumlah kegiatan terserap anggaran 50-79,9% : - kegiatan
4. Jumlah kegiatan terserap anggaran 50% : - kegiatan

Adapun hasil penelitian berdasarkan variabel adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan Anggaran

   Pertanyaan pertama peneliti menanyakan mengenai bagaimana sistem penganggaran dalam pencapaian visi, misi, sasaran, target serta strategi organisasi? dan jawaban dari pihak informan adalah sebagai berikut :

   "Sistem penganggaran yang kita gunakan sekarang sudah diatur dalam aplikasi yang biasa disebut SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), jadi semua program dan kegiatan yang ada merupakan turunan dari Renstra dan Renja, sehingga ada yang disebut RKA yang menjadi landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sedangkan, untuk sistem penganggaran dalam pencapaian visi, misi, sasaran, target serta strategi organisasi di kantor ini bisa dilihat dari pencapaian setiap program dan kegiatan pada Laporan Kinerja (LAKIP) 2020". (W3, 10 Juni 2021)

   Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana proses penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap tahun (Renja)? dan jawaban informan adalah sebagai berikut *:"Kalau penyusunan Renja setiap tahun melalui 2 tahap yaitu tahap perumusan dan*

tahap penyajian. Proses penyusunan Renja OPD sendiri dimulai dengan rancangan Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Kemudian, rancangan Renja OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan". (W3, 10 Juni 2021)

Selanjutnya peneliti menanyakan adakah standar biaya yang digunakan sebagai patokan dalam penyusunan anggaran? dan jawaban informan adalah sebagai berikut :

"Ada yaitu standar biaya belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Dulu standar biaya yang digunakan dibuat dalam satu dokumen tapi sekarang standar biaya yang kita gunakan sudah diatur dibagian perekonomian oleh Sekretaris Daerah. Jadi, setiap penyusunan anggaran kita lakukan bersama Sekretaris Daerah dan Bappeda Kabupaten". (W3, 10 Juni 2021)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apa Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai setiap program yang dimaksudkan dalam penganggaran? dan jawaban informan adalah sebagai berikut :

"Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai setiap program dapat dilihat pada Laporan Kinerja (LAKIP) yang setiap program atau kegiatan yang dijalankan mempunyai presentasi capaian dari masing-masing kegiatan yang dijalankan. Indikator kinerja tergambar efektivitasnya apabila dilihat dari anggaran tahun sebelumnya, sehingga tahun depan anggaran semakin meningkat dengan program-program baru yang ditingkatkan". (W3, 10 Juni 2021)

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Peneliti menanyakan hambatan apa yang sering ditemui sehingga penganggaran ditolak dewan legislatif? dan jawaban informan adalah sebagai berikut :

"Masalah hambatan tidak terlalu dipermasalahkan karena penganggaran kita ini sudah hasil dari forum bersama dengan pemangku kepentingan, sepertinya belum pernah di tolak legislatif karena setiap ada hambatan-hambatan kita langsung komunikasikan sama Bapedda Kabupaten kemudian ke bagian keuangan. Walaupun ada hambatan- hambatan sedikit tapi bisa terselesaikan dengan cepat". (W3, 10 Juni 2021)

c. Tahap Implementasi Anggaran

Peneliti menanyakan mengenai bagaimana proses pengalokasian anggaran kepada semua program yang dilakukan? dan jawaban dari pihak informan adalah sebagai berikut :

"Proses pengalokasian anggaran untuk semua program kita sesuaikan dengan Renstra, Renja serta kegiatan yang dilakukan. Tapi misalnya ada pelatihan untuk aparatur desa di seluruh Kecamatan Maiwa yang dialokasikan adalah sebesar 15 jt bisa saja naik menjadi 20 jt karena kepentingan dan harus anggaran sebesar itu. Jadi, output dan outcomenya harus jelas. Pelaporan dan pertanggung jawabannya juga harus sesuai dengan apa yang dikerjakan". (W2, 11 Juni 2021)

Peneliti menanyakan tentang apakah dalam pelaksanaan setiap program diterapkan standarisasi harga satuan barang dan jasa? Dan jawaban pihak informan adalah sebagai berikut : *"Jelas kita disini menerapkan standarisasi harga satuan barang dan jasa untuk setiap program karena kalau kita tidak punya pedoman ini bisa jadi belanja yang dilakukan kurang dan bisa juga lebih. Kita saat ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang tatakelola anggarannya baik".* (W2, 11 Juni 2021)

Peneliti menanyakan tentang apakah ada pemberlakuan reward dan punishment dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja? Serta bagaimana bentuknya? Dan jawaban informan adalah sebagai berikut *: "Ada, kalau untuk bentuknya reward biasanya kita berikan dalam bentuk promosi. Kita lihat bagaimana kinerjanya dalam mencapai tujuan organisasi, kalau kinerjanya sudah bagus kita promosikan naik golongan ke pimpinan. Untuk punishment biasanya kita berikan sanksi berupa teguran, surat peringatan dan pemecatan. Sampai saat ini yang sering kita berikan itu teguran karena sering terlambat datang kekantor atau kinerjanya kurang memuaskan".* (W1, 11 Juni 2021)

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Peneliti menanyakan tentang bagaimana proses penyusunan pelaporan kinerja (LAKIP) pada setiap kegiatan yang termuat dalam RKA? jawaban informan adalah sebagai berikut :

"Proses penyusunan laporan kinerja setiap kegiatan yang termuat di DPA dimulai dengan penyusunan DPA OPD, penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran OPD kemudian penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja OPD dan terakhir penyusunan RKA OPD". (W3, 10 Juni 2021)

Peneliti menanyakan tentang apa saja permasalahan yang dihadapi dalam implementasi anggaran berbasis kinerja? Dan jawaban informan adalah sebagai berikut :

"Kalau permasalahan yang sering kami hadapi tingkat pengetahuan aparatur masih relatif rendah, terbatasnya sarana dan prasarana, belum optimalnya koordinasi antar instansi, rendahnya kesadaran masyarakat tentang tertib dan sadar hukum serta angka kemiskinan yang masih tinggi. Permasalahan ini yang setiap tahun kami jadikan program dan kegiatan". (W1, 11 Juni 2021)

Penyelenggaraan Pemerintahan Berupa Kinerja

Peneliti menanyakan tentang apa output dan outcome dari implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja? Dan jawaban informan adalah sebagai berikut :

"Berbicara tentang output dan outcome atau hasil bisa dilihat dari laporan kinerja yaitu hasil pengukuran yang menunjukkan bahwa program atau kegiatan di Kantor Kecamatan Maiwa telah berhasil mencapai sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan. Seperti yang sudah kita laksanakan yaitu

"program perencanaan kegiatan berupa penyelenggaraan musrenbang RKPD jadi inputnya berupa dana sebesar Rp 20.000.000, outputnya berupa terlaksananya musrenbang desa dan kecamatan sedangkan outcomenya berupa Tersusunnya dokumen hasil musrenbang tahunan kecamatan. Jadi semua program dan kegiatan yang kami laksanakan sudah ditentukan memang apa imputnya, outputnya sama outcomenya". (W1, 11 Juni 2021)

Pembahasan

Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ditentukan dari siklus anggaran menurut Mardiasmo (2011: 70) yang meliputi tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap implementasi anggaran serta tahap pelaporan dan evaluasi anggaran yang disesuaikan dengan output dan outcome. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 tentang RPJPD Tahun 2008-2028 yang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Enrekang.

Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Kantor Kecamatan Maiwa terdapat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun pembahasan hasil dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pada tahap persiapan anggaran di Kantor Kecamatan Maiwa dilakukan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi dasar pelaksanaan program dan

kegiatan di Kantor Kecamatan Maiwa sebagai pengguna anggaran dan mengutamakan pencapaian hasil kinerja.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 RKPJP, RPJMPD dan RKPD disusun dengan tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan yang di lakukan di tahap ratifikasi.

Sistem penganggaran yang digunakan berbasis aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Standar biaya sebagai patokan dalam penyusunan anggaran di Kantor Kecamatan Maiwa meliputi standar biaya belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, sasaran, target serta strategi organisasi dalam tersedianya informasi finansial yang lengkap untuk digunakan sebagai penyusunan anggaran pada rapat kerja anggaran.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pada tahap ratifikasi anggaran di Kantor Kecamatan Maiwa tidak menemukan adanya hambatan dari masalah penganggaran dan waktu pengesahan telah sesuai dengan rencana implementasi anggaran serta alasan yang disampaikan dalam pengesahan telah sesuai dengan perencanaan pembuatan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yaitu sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan standar kerja yang telah ditetapkan.

c. Tahap Implementasi Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pada tahap implementasi anggaran di Kantor Kecamatan Maiwa terdapat Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, sistem tersebut dinamakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan program atau aplikasi komputer dengan total anggaran yang sudah tercatat dalam sistem. Pada tahap implementasi, pengalokasian anggaran untuk semua program disesuaikan dengan Renstra, Renja serta kegiatan yang dilakukan.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran di Kantor Kecamatan Maiwa sangat memperhatikan akuntabilitas suatu anggaran dalam bentuk laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja anggaran. Hasil dari pelaporan dan evaluasi anggaran sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, apabila sistem tersebut terlaksana dengan baik maka akan menghasilkan laporan yang baik dan sesuai dengan rencana. Laporan realisasi Kantor Kecamatan Maiwa telah memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan serta mendorong aparaturnya untuk selalu meningkatkan kinerja.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan Berupa Kinerja

Kantor Kecamatan Maiwa tahun 2020 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada seluruh kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013

tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Standar Biaya yang digunakan untuk capaian kinerja di Kantor Kecamatan Maiwa adalah Standar Biaya Keluaran yang estimasi dasar pengajuan anggaran yang disesuaikan dengan melihat kewajaran masing-masing komponen biaya. Adapun pembahasan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Output (Keluaran) Dijelaskan bahwa output dalam Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang terlampir pada tabel 5.3 telah sesuai dengan target dan realisasi atas capaian masing-masing kegiatan. Tabel 5.3 menunjukkan bahwa indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan sumber data dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja. Realisasi keluaran capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 100% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran. Adapun penjelasan tentang output setiap kegiatan adalah sebagai berikut :Terselenggaranya urusan pelimpahan kewenangan kabupaten di kecamatan berupa

pemungutan PBB yang dilaksanakan di 21 Desa/1 Kelurahan.

Terselenggaranya administrasi perkantoran sarana dan prasarana dan pembinaan SDM aparat perangkat daerah di Kecamatan Maiwa terdiri atas 1 Kelurahan yang mendapatkan BOP, 15 orang pegawai yang lulus, 120 kali rapat koordinasi dan konsolidasi, pemeliharaan 1 unit gedung kantor, pemeliharaan 4 unit kendaraan dinas, pemeliharaan 5 jenis peralatan gedung kantor, pemeliharaan 1 unit rumah jabatan, 4 dokumen administrasi keuangan dan perkantoran, 3 jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia, 12 jenis komponen instalasi listrik yang tersedia, 2 jenis peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur serta 3 kali rapat koordinasi konsultasi keluar daerah.

Terselenggaranya penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja perangkat daerah terdiri atas 1 dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun, 1 dokumen DPA, 1 dokumen laporan capaian kinerja, 1 dokumen rencana kerja serta 1 dokumen RKA.

Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Maiwa berisi 1 dokumen evaluasi RAPBDes, aparat 21 Desa/ 1 Kelurahan yang dibina, 21 Desa/1 Kelurahan yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan keuangan, 21 Desa/1 Kelurahan yang dibina dan diawasi dalam perencanaan keuangan, 21 Desa/1 Kelurahan yang dibina dan diawasi dalam pelaksanaan kegiatan, 21 Desa/1 Kelurahan yang dibina dan diawasi dalam pelaporan keuangan serta 21 Desa/1 Kelurahan yang dibina dan diawasi dalam evaluasi ADD.

Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kecamatan dan koordinasi kegiatan perangkat daerah di Kecamatan Maiwa berisi 1 dokumen musrenbang, 8 kasus pertanahan yang diselesaikan, 1 organisasi yang menangani kemiskinan, 80 orang peserta paskibra dan 21 Desa/1 Kelurahan penanganan/pemeliharaan kantribmas.

Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di Kecamatan Maiwa yaitu 1 Kelurahan..

Outcome (Hasil), Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian outcome di Kantor Kecamatan Maiwa sudah dikatakan baik dari 6 program dan 31 kegiatan dengan target hasil pencapaian setiap kegiatan mendapatkan hasil yang memuaskan. Adapun penjelasan tentang outcome setiap kegiatan adalah sebagai berikut :
Terselenggaranya urusan pelimpahan kewenangan kabupaten di Kecamatan Maiwa dengan tercapainya target

PBB dan PAD yang tepat waktu.

Terselenggaranya administrasi perkantoran sarana dan prasarana dan pembinaan SDM aparat perangkat daerah dengan berjalannya kegiatan operasional kantor, meningkatnya kompetensi dan pengetahuan aparatur, berjalannya fungsi koordinasi dan konsolidasi dalam daerah, tersedianya gedung kantor yang memadai, kendaraan dinas dalam kondisi layak pakai dan layak jalan, tersedianya alat penunjang pelayanan yang memadai, tersedianya rumah jabatan dinas yang memadai, terwujudnya pengelolaan keuangan dan administrasi, terciptanya kondisi kantor yang nyaman, bersih dan tertata rapi, terciptanya tugas dan fungsi kantor pelayanan, terciptanya sistem penerangan kantor yang optimal, serta berjalannya tugas dan fungsi organisasi pemerintahan.

Terselenggaranya penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja perangkat daerah dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, terwujudnya DPA yang sesuai APBD, terwujudnya akuntabilitas kinerja kecamatan, terwujudnya peningkatan kualitas program/kegiatan yang terkoordinir serta meningkatnya sistem perencanaan yang sesuai anggaran, Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dengan terbentuknya peraturan desa yang lebih akurat, terciptanya penyelenggaraan pemerintah desa, terwujudnya pengelolaan keuangan desa, terwujudnya perencanaan keuangan desa, terciptanya pelaksanaan kegiatan dana desa, terwujudnya pelaporan keuangan serta terbentuknya ADD yang akurat.

Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kecamatan dan koordinasi kegiatan perangkat daerah di Kecamatan Maiwa dengan tersusunnya dokumen hasil musrenbang tahunan kecamatan, terselesaikannya permasalahan konflik pertanahan, terwujudnya peningkatan kualitas program/kegiatan yang terkoordinir, terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan, olahraga dan seni serta terwujudnya keamanan dan ketertiban.

Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan tersedianya

sarana dan prasarana Kelurahan Bangkala yang baik. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pada implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Maiwa telah terlaksana dengan baik dan telah mencapai pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sebelumn ya dilakukan oleh Venni Avionita (2013) yang menunjukkan bahwa implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Ana Muchlisa Rezeqiah (2017) menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Muh. Imadudin Akmal (2018) menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan secara benar, dilihat dari lima aspek yaitu perencanaan anggaran dan kinerja, realisasi anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta pelaporan anggaran dan kinerja.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Espinoza (2014) yang menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja rasio kemandirian keuangan Kota Medan masih tergolong rendah dan cenderung menurun. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Yuli Anggraini (2016) yang menunjukkan bahwa implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja di PTAIN X ditinjau dari 4 aspek yang masih memerlukan perbaikan dan pengembangan agar penyusunanm anggaran berbasis kinerja di PTAIN X menghasilkan anggaran yang andal dan akurat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan yang diperoleh dari pembahasan dan uraian bab IV adalah seluruh aktivitas Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang meliputi tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap implementasi anggaran serta tahap pelaporan dan evaluasi anggaran dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

   Meskipun Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan dengan baik, hendaknya perlu ditingkatkan kembali menjadi sangat baik agar kedepannya hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan lebih efektif, efisien dan ekonomis.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Disarankan agar menambah referensi lain untuk memperluas objek penelitian serta menambah variabel lain di luar variabel yang telah diteliti dan menambah responden lain.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Akmal Muh. Imadudin. (2018). *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros).* Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

[2] Aliyuddin, Rizal Sukma. (2016). *Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Opd) (Studi Kasus Pada Kecamatan Lelela Kabupaten Indramayu)*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi. Vol. 3, No. 2, ISSN: 2356-3923.

[3] Anggraini, Yuli. (2016). *Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja: Sebuah Studi Fenomenologis (Studi Kasus pada Perguruan Tinggi Agama Islam X).* Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya.

[4] Anugerahani, Ika Dian, dan Sentot Imam Wahjono. (2013). *Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Kediri).*

[5] Avionita, Venni. (2013*). Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).* Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama, Bandung.

[6] Ezponiza, E. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

[7] Nanda, Reza, Dan Darwanis. (2016). *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan).* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka). Vol. 1, No. 1, 2016 Halaman 327-340.

[8] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

[9] Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

[10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

[11] Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

[12] Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

[13] Pratama, Anggi, dan Bagus Handoko. (2018). *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai*. Vol. 2, No. 2, ISSN: 2087-4669.

[14] Rezeqiah, Ana muchlisa. (2017). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).* Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[15] Sembiring, R. A. (2016). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.* E-Journal Universitas Atma Jaya*,* Vol 15 (1), hal: 61-103.

[16] Sofyani, Hafiez**,** dan Made Aristia Prayudi. (2018). *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja "A".* Jurnal Ilmiah Akutansi dan Bisnis, Vol. 13, No. 1, Januari 2018.

[17] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[18] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.